



## PERUBAHAN SOSIAL EKONOMI DAN EKOLOGI DALAM UPAYA PENGELOLAAN SUB DAERAH ALIRAN SUNGAI PUSUR DI KABUPATEN KLATEN

Yuanita Dwi Hapsari<sup>1\*</sup>, Ghina Reftantia<sup>2</sup>, Deni Aries Kurniawan<sup>3</sup>, Maulida Masyitoh<sup>4</sup>, Triana Rahmawati<sup>5</sup>

<sup>1\*,2,3,4</sup>Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya. Ogan Ilir, Indonesia

<sup>5</sup>Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

Email: <sup>1</sup>yuanitadwihapsari@fisip.unsri.ac.id, <sup>2</sup>ghinareftantia@fisip.unsri.ac.id,

<sup>3</sup>deniarieskurniawan@fisip.unsri.ac.id, <sup>4</sup>maulidamasyitoh@fisip.unsri.ac.id,

<sup>5</sup>trianarahmawati@staff.uns.ac.id

### ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji perubahan sosial, ekonomi, dan ekologi dalam pengelolaan Sub Daerah Aliran Sungai (Sub DAS) Pusur di Kabupaten Klaten, dengan menekankan pada distribusi peran aktor dan kontribusi kelembagaan lokal. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi di wilayah hulu, tengah, dan hilir Sub DAS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan multipihak yang meliputi komunitas lokal, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan lembaga swadaya masyarakat telah mendorong transformasi sosial-ekologis yang signifikan. Perubahan pada aspek sosial kelembagaan, terlihat dari adanya peningkatan kesadaran kolektif warga dalam membentuk dan mengembangkan komunitas peduli sungai, seperti Pusur Institute, yang berperan sebagai ruang kolaboratif lintas aktor. Secara ekologis, kondisi sungai mengalami perbaikan melalui praktik konservasi pada kawasan hulu sebagai recharge area, pengurangan sampah melalui bank sampah, wisata tubing, dan pertanian ramah lingkungan yang menjadikan sungai sebagai aset ekowisata dan ruang hidup bersama. Sementara itu, pada dimensi ekonomi, munculnya aktivitas seperti budidaya tanaman alternatif, wisata tubing dan bank sampah telah menciptakan sumber penghasilan alternatif bagi masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa pengelolaan Sub DAS yang berbasis partisipasi masyarakat dan penguatan kelembagaan lokal dapat menjadi strategi efektif dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal.

**Kata Kunci:** Perubahan Sosial, Ekologi Sungai, Ekonomi Lokal, Sub DAS Pusur

### ABSTRACT

*This study examines the social, economic, and ecological transformations in the management of the Pusur Sub-Watershed (Sub DAS) in Klaten Regency, with a focus on the distribution of actor roles and the contribution of local institutional arrangements. The research adopts a qualitative approach, utilizing data collection methods such as observation, in-depth interviews, and documentation across the upstream, midstream, and downstream areas of the sub-watershed. The findings reveal that multi-stakeholder engagement including local communities, regional governments, businesses, and non-governmental organizations has driven significant socio-ecological transformations. Social-institutional changes are evident in the increased collective awareness among residents to establish and participate in river conservation communities, such as the Pusur Institute, which functions as a collaborative platform across actors. Ecologically,*

*improvements are observed through conservation practices in upstream recharge areas, waste reduction through waste banks, eco-friendly agriculture, and river tubing activities, which have transformed the river into both an ecological and recreational asset. Economically, the development of alternative livelihoods such as conservation farming, river tourism, and waste bank initiatives has provided supplementary income for local communities. These findings suggest that Sub-Watershed management based on community participation and strengthened local institutions can serve as an effective strategy for achieving sustainable development at the local level.*

**Keywords:** Social Change, River Ecology, Local Economy, Pusur Sub-Watershed

## A. PENDAHULUAN

Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) menjadi tantangan strategis dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia, terutama karena tekanan dari urbanisasi, alih fungsi lahan, pertanian intensif, dan perubahan iklim [1]. Perubahan iklim dan degradasi ekologis memperparah ancaman bagi sistem penyangga air dan produktivitas DAS [2]. Di tengah keterbatasan regulasi yang terfragmentasi dan koordinasi antar-instansi yang lemah, pendekatan berbasis masyarakat (*community-based watershed management*) mulai diakui sebagai solusi efektif dalam menjaga keberlanjutan fungsi ekosistem dan meningkatkan kesejahteraan lokal [3], [4].

Di Indonesia, masalah yang dihadapi dalam pengelolaan DAS antara lain lemahnya integrasi antar sektor, tumpang tindih regulasi, tidak jelasnya wewenang antar pihak, serta rendahnya partisipasi lokal [5]. Implementasi kebijakan nasional seperti Undang-Undang No. 37/2014 tentang Konservasi Tanah dan Air serta No. 17/2019 tentang Sumber Daya Air belum berjalan optimal akibat kurangnya pedoman teknis, peran kelembagaan yang kabur, serta terbatasnya anggaran operasional [2].

Menurut Narendra (2021), pendekatan pemulihan dan konservasi daerah aliran sungai masih terfokus pada aspek teknis tanpa pemberdayaan komunitas dan tata kelola kelembagaan yang inklusif [6]. Konflik kelembagaan, baik vertikal maupun horizontal, juga menjadi kendala serius. Otonomi daerah, misalnya, menciptakan fragmentasi kewenangan yang menyulitkan sinkronisasi kebijakan lintas pemerintahan tingkat provinsi, kabupaten, dan desa [7]. Banyak lembaga yang memiliki kewenangan tumpang tindih tanpa koordinasi jelas, sehingga pelaksanaan program pengelolaan DAS tidak efektif [1], [8].

Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) tidak sekadar menyangkut aspek fisik atau teknis konservasi, tetapi juga menggambarkan hubungan sosial yang kompleks antara masyarakat dan lingkungannya. Melalui pendekatan sosiologi lingkungan, dapat dipahami bahwa persepsi, tindakan, dan keterlibatan masyarakat terhadap lingkungan dipengaruhi oleh konstruksi sosial yang berkembang di ruang kehidupan mereka. Keterlibatan komunitas lokal dalam pengelolaan lingkungan memainkan peran penting, terutama jika mempertimbangkan karakter sosial, budaya, dan ekonomi setempat. Oleh karena itu, pendekatan yang hanya berorientasi pada kebijakan sentralistik dan teknokratis tidak lagi memadai. Dibutuhkan strategi pengelolaan yang inklusif, partisipatif, dan peka terhadap kondisi lokal untuk mencapai keberlanjutan yang adil dan menyeluruh [9].

Berbagai studi kasus juga menunjukkan tantangan implementasi, seperti di Bogor, dimana model pengelolaan berbasis komunitas belum optimal karena adaptasi kelembagaan yang kurang, minimnya partisipasi masyarakat, dan

kelemahan kemampuan manajerial komunitas [10]. Di DAS Ciliwung, ketidaksepahaman vertikal dan koordinasi antar tingkatan pemerintahan membuat kebijakan mitigasi banjir tidak berjalan sesuai rencana [7]. Lebih lanjut, tantangan teknis seperti erosi, sedimentasi, alih guna lahan, dan degradasi vegetasi secara langsung menurunkan fungsi hidrologis DAS dan meningkatkan risiko bencana [6].

Penelitian di DAS *transboundary* antara Indonesia dan Timor-Leste menunjukkan bahwa perubahan penggunaan lahan dan kurangnya kerjasama kelembagaan memperburuk degradasi sumber daya air [11]. Di sisi lain, riset di DAS Serayu dan Citarum memperlihatkan potensi integrasi antara konservasi, ekowisata, dan penguatan komunitas lokal melalui CSR dan pembangunan berbasis desa wisata sebagai cara menjaga kelestarian sementara meningkatkan ekonomi masyarakat [5], [12]. Studi tersebut membuktikan bahwa pendekatan *pentahelix* kolaborasi antara komunitas, pemerintah, akademisi, sektor swasta, dan media/LSM memiliki efek positif bila dijalankan dengan sinergi kelembagaan yang jelas. Dalam konteks tersebut, Sub DAS Pusur di Kabupaten Klaten merupakan contoh penerapan pendekatan multipihak yang layak dikaji. Di sana terbentuk berbagai komunitas lokal (konservasi hulu, peduli sungai, bank sampah, GP3A, klinik pertanian), terjadinya deklarasi kelembagaan kolektif Pusur Institute pada 2017, serta keterlibatan sektor swasta melalui CSR PT Tirta Investama (AQUA) dan mitra LSM seperti LPTP, Gita Pertiwi, dan LESTARI [13], [14]. Inisiatif ini menawarkan pengalaman lokal dimana kelembagaan informal dan formal dibangun secara koheren untuk menjawab tantangan ekologis, sosial, dan ekonomi secara bersamaan.

Sub DAS Pusur dipilih sebagai lokasi penelitian karena menghadirkan dinamika sosial yang khas dalam pengelolaan lingkungan berbasis komunitas. Inisiatif seperti “Grebeg Sungai” yang lahir dari masyarakat Kecamatan Polanharjo mencerminkan kuatnya nilai gotong royong dan solidaritas lokal dalam menjaga sungai. Pembentukan Pusur Institute sebagai wadah kolaboratif lintas aktor dari hulu hingga hilir menunjukkan adanya struktur sosial partisipatif yang menarik untuk dikaji secara sosiologis. Kekhasan praktik budaya ini merepresentasikan bagaimana komunitas lokal merespons krisis ekologis melalui mekanisme kontrol sosial dan institusionalisasi nilai-nilai kolektif dalam pengelolaan DAS. Untuk itu artikel ini bertujuan untuk memaparkan perubahan sosial, ekonomi, dan ekologi masyarakat dalam upaya pengelolaan Sub Daerah Aliran Sungai (Sub DAS) Pusur di Kabupaten Klaten.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk mengungkap makna di balik perubahan sosial, ekonomi, dan ekologi yang terjadi dalam konteks pengelolaan Sub DAS Pusur. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami secara mendalam bagaimana masyarakat merespons perubahan tersebut berdasarkan pengalaman hidup, nilai-nilai lokal, serta struktur sosial yang ada. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk melihat langsung kondisi fisik sungai serta aktivitas masyarakat di sekitar Sub DAS Pusur. Wawancara dilakukan terhadap informan untuk memperoleh informasi terkait gambaran perubahan yang terjadi setelah adanya upaya pengelolaan Sub DAS Pusur. Dokumentasi digunakan untuk merekam kegiatan, arsip, dan visual yang relevan dengan aktivitas pengelolaan sungai.

Informan dalam penelitian ini dipilih melalui teknik *purposive sampling*, yakni dengan mempertimbangkan keterlibatan aktif serta pengetahuan yang relevan terhadap proses pengelolaan Sub DAS Pusur. Individu yang dipilih mencakup tokoh lokal, anggota komunitas pengelola sungai, serta warga yang memiliki pengalaman langsung dalam kegiatan pengelolaan Sub DAS Pusur.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahapan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan [15]. Validitas data diuji melalui triangulasi sumber dan teknik. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya menggambarkan secara mendalam keterkaitan antara partisipasi masyarakat dan dampaknya terhadap perubahan sosial, ekonomi, serta ekologi di kawasan Sub DAS Pusur.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Aktor dan Peranya dalam Pengelolaan Sub DAS Pusur**

Pengelolaan Sub Daerah Aliran Sungai (Sub DAS) Pusur di Kabupaten Klaten merupakan hasil dari keterlibatan multipihak yang saling terhubung dalam satu kesatuan sistem kelembagaan. Dalam konteks ini, kelembagaan tidak hanya mencakup organisasi formal pemerintahan, tetapi juga mencakup peran serta masyarakat, komunitas lokal, sektor swasta, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam upaya konservasi, edukasi lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat sekitar sungai.

#### **1. Komunitas sebagai Motor Penggerak Lokal**

Di sepanjang aliran Sub DAS Pusur dari kawasan hulu, tengah, hingga hilir berkembang beragam komunitas yang memainkan peran sentral dalam pengelolaan lingkungan sungai. Pengelolaan Sub DAS Pusur merupakan ruang sosial tempat berbagai bentuk produksi makna dan praktik budaya berlangsung, yang dipengaruhi oleh kepemilikan modal sosial dari aktor-aktor yang terlibat di dalamnya. Modal sosial merujuk pada nilai-nilai yang terkandung dalam hubungan antarindividu [16]. Dalam konteks pengelolaan Sub DAS Pusur, keterhubungan antarkomunitas terbentuk melalui jejaring sosial berbasis kedekatan personal maupun kesamaan tujuan. Modal ini dimanfaatkan oleh para pelaku untuk menjalin koordinasi lintas wilayah dari bagian hulu hingga hilir dalam rangka menjalankan berbagai aspek pengelolaan sungai. Setidaknya terdapat lima bentuk komunitas utama yang teridentifikasi memiliki kontribusi aktif.

Pertama, komunitas konservasi di wilayah hulu berfokus pada kegiatan perlindungan sumber daya air melalui pendekatan sekolah lapang konservasi. Wilayah hulu sangat penting sebagai area tangkapan dan resapan air (*recharge area*), namun tantangan geografis seperti porositas tanah menyebabkan air cepat meresap sehingga pasokan permukaan menjadi terbatas. Komunitas di wilayah ini menjalankan kegiatan seperti budidaya tanaman konservatif (kopi, teh, bunga krisan, anggrek Merapi), serta penghijauan, untuk meningkatkan kapasitas lahan dalam menyerap dan menahan air hujan [17].

Kedua, komunitas peduli sungai yang berkembang di wilayah tengah memainkan peran penting dalam perawatan badan sungai, menjaga kebersihan aliran air, serta mendukung pengembangan ekowisata, khususnya wisata tubing di Sungai Pusur. Ekowisata ini tidak hanya memberi manfaat ekonomi tetapi juga mendorong kesadaran kolektif untuk menjaga kualitas lingkungan. Lima komunitas peduli sungai yang aktif di antaranya adalah OMAC, Rivermoon, Taman Banyu Gemblinding (TBG), Watu Kapu, dan RTPA [18]. Masing-masing

memiliki struktur organisasi yang berbeda: ada yang dikelola mandiri oleh warga, oleh karang taruna, hingga yang berada di bawah naungan dinas pariwisata.

Ketiga, komunitas bank sampah hadir sebagai strategi pengelolaan limbah rumah tangga agar tidak langsung dibuang ke sungai. Keberadaan bank sampah di wilayah tengah DAS, khususnya di Kecamatan Polanharjo, sangat signifikan. Di setiap desa telah terbentuk unit bank sampah yang berafiliasi dalam wadah induk bernama Bank Sampah Semut Harjo. Selain bertujuan mengurangi beban pencemaran sungai, komunitas ini juga mengedukasi masyarakat untuk memilah sampah dan menciptakan nilai ekonomi dari barang sisa.

Keempat, Klinik Pertanian di Desa Karanglo berperan sebagai pusat edukasi bagi petani untuk mendorong praktik pertanian berkelanjutan. Dengan mengurangi ketergantungan pada bahan kimia dan memperkenalkan teknik pertanian ramah lingkungan, klinik ini turut mengurangi beban polusi dari aktivitas pertanian yang mengalir ke sungai. Klinik ini bahkan mendapatkan legitimasi dari pemerintah daerah dengan diresmikannya menjadi Klinik Pertanian Terpadu serta ditetapkan sebagai lokasi Joglo Tani Nasional pada tahun 2018.

Kelima, Gabungan Perkumpulan Petani Pengguna Air (GP3A) beroperasi di wilayah hilir dan memiliki fungsi mengelola distribusi air irigasi, terutama pada musim kemarau saat debit air menurun. Kehadiran GP3A penting dalam menjaga keadilan distribusi air antar petani serta mencegah potensi konflik horizontal akibat keterbatasan sumber daya air.

## 2. Integrasi Lintas Komunitas: Peran Pusur Institute

Meskipun beragam komunitas telah lama aktif secara mandiri, pengelolaan yang terintegrasi baru mulai terbentuk dengan hadirnya Pusur Institute. Lembaga ini dideklarasikan pada 8 Desember 2017 oleh Bupati Klaten sebagai bentuk formal kolaborasi antar pihak yang memiliki visi dan komitmen terhadap pelestarian Sub DAS Pusur [19]. Sebelumnya, sejak 2012, sudah mulai tumbuh inisiatif pelestarian lingkungan seperti konservasi hulu, bank sampah, hingga inisiasi wisata tubing. Namun, kegiatan-kegiatan tersebut berlangsung secara terfragmentasi.

Cikal bakal konsolidasi kelembagaan ini muncul melalui kegiatan “Grebeg Sungai” pada tahun 2016, yang merupakan ajakan massal untuk membersihkan aliran Sungai Pusur. Inisiatif ini dipelopori oleh pemerintah Kecamatan Polanharjo dan berhasil menyatukan berbagai pihak. Grebeg Sungai kemudian menjadi titik awal terbentuknya Pusur Institute sebagai wadah koordinasi strategis dan jembatan komunikasi antar aktor, dari masyarakat hingga pemangku kebijakan.

Pusur Institute memiliki visi “Harmonisasi berbagai kepentingan terhadap pelestarian Sub DAS Pusur.” Lembaga ini beroperasi dengan semangat kemandirian dan kesukarelaan serta menjunjung tujuh prinsip keanggotaan, yaitu: gotong royong, sukarela, partisipasi penuh, kesetaraan, saling belajar, independensi, dan keterbukaan. Struktur anggotanya mencakup komunitas hulu-tengah-hilir, pemerintah desa dan kecamatan, akademisi, media, pelaku usaha, serta organisasi masyarakat sipil.

Istilah “institute” dalam penamaannya menggambarkan eksistensinya sebagai sebuah lembaga pembelajaran yang memiliki legitimasi dan misi dalam mengembangkan pengetahuan serta praktik pengelolaan Sub DAS Pusur. Ini erat kaitannya dengan modal simbolik, yang merujuk pada akumulasi reputasi, kehormatan, dan pengakuan sosial yang diperoleh melalui konstruksi pengetahuan serta legitimasi yang diterima dalam suatu konteks sosial [20].

### 3. Peran Dunia Usaha: CSR PT Tirta Investama (AQUA)

Kontribusi sektor swasta dalam pengelolaan Sub DAS Pusur diwujudkan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) oleh PT Tirta Investama (AQUA). Pabrik AQUA yang berdiri di wilayah tengah Sub DAS, tepatnya di Desa Wangen, Kecamatan Polanharjo, memegang prinsip keberlanjutan global “One Planet One Health”. Prinsip ini menekankan keterkaitan erat antara kesehatan manusia dan kesehatan lingkungan.

PT Tirta Investama tidak hanya menyusun peta jalan (roadmap) program lingkungan, tetapi juga terlibat langsung dalam penguatan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat. Program-program CSR mencakup konservasi hulu, pembangunan ekowisata, pengelolaan limbah, pelatihan pertanian ramah lingkungan, dan dukungan terhadap komunitas lokal dalam bentuk fisik maupun nonfisik. Pendekatan ini memperlihatkan upaya harmonisasi antara kepentingan bisnis dan tanggung jawab ekologi-sosial di tingkat lokal. Pelaksanaan berbagai program CSR telah berkontribusi pada perubahan cara hidup dan ekonomi lokal. Warga yang sebelumnya mengandalkan metode pertanian tradisional kini mulai beralih ke praktik yang lebih berkelanjutan. Keterlibatan mereka dalam kegiatan pelestarian lingkungan juga membentuk kesadaran bersama mengenai pentingnya menjaga ekosistem sungai. Di sisi lain, program CSR ini membuka peluang ekonomi baru, seperti dari sektor pariwisata berbasis lingkungan, dan memperkuat peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya alam.

### 4. Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai Mitra Fasilitator

Pelaksanaan program CSR dan pengelolaan Sub DAS Pusur melibatkan LSM sebagai mitra teknis dalam pemberdayaan masyarakat dan juga agen perubahan sosial yang mendorong transformasi di tingkat komunitas. Tiga lembaga yang teridentifikasi aktif ialah LPTP Surakarta, Gita Pertiwi, dan LESTARI. LPTP memiliki spesialisasi dalam konservasi kawasan hulu dan penguatan kelembagaan lokal. Gita Pertiwi memfokuskan kegiatan pada praktik pertanian berkelanjutan, sementara LESTARI berperan dalam pengelolaan dan penguatan sistem bank sampah.

Keberadaan LSM ini menjembatani komunikasi dan koordinasi antara sektor swasta, masyarakat, dan pemerintah. Selain itu, mereka memfasilitasi proses alih pengetahuan dan keterampilan kepada komunitas lokal melalui berbagai kegiatan pelatihan dan pendampingan. Dengan demikian, kapasitas masyarakat dalam mengelola sumber daya secara mandiri dan berkelanjutan terus meningkat, memperkuat pemberdayaan dari akar rumput dan memastikan bahwa setiap intervensi selaras dengan konteks sosial-budaya setempat.

### 5. Peran Pemerintah Lokal dalam Regulasi dan Koordinasi

Kehadiran pemerintah, baik di tingkat kecamatan maupun desa, menjadi pilar penting dalam penguatan regulasi dan fasilitasi ruang partisipasi masyarakat. Pemerintah Kecamatan Polanharjo bersama desa-desa seperti Karanglo, Wangen, Polan, dan Keprabon secara aktif merumuskan kebijakan lokal terkait pengelolaan lingkungan, tata ruang, dan pengurangan limbah. Kehadiran regulasi ini menjadi bentuk legitimasi terhadap inisiatif masyarakat, sekaligus menciptakan kerangka hukum yang mendukung keberlanjutan program di tingkat akar rumput.

Selain regulasi, pemerintah juga berperan dalam membangun jejaring antar aktor dan mendorong pembentukan forum-forum koordinasi lintas sektor. Kolaborasi ini memperlihatkan bagaimana pemerintah daerah dapat bertransformasi dari aktor pengatur menjadi fasilitator perubahan sosial dan ekologis di tingkat lokal.

### **Perubahan dari Aspek Sosial Kelembagaan**

Pengelolaan Sub DAS Pusur telah memberikan dampak perubahan pada aspek sosial dan kelembagaan masyarakat. Sebelum ada inisiatif pengelolaan Sub DAS Pusur, kepedulian masyarakat untuk berjejaring dalam sebuah komunitas sangatlah rendah. Kalaupun ada keterlibatan hanya sebagai pada kelompok masyarakat tertentu. Namun setelah ada aksi kolektif dalam pengelolaan Sub DAS Pusur, masyarakat baik di hulu, tengah, maupun hilir memiliki kesadaran untuk berkumpul secara kolektif dan berjejaring dalam sebuah organisasi atau komunitas. Hal tersebut dapat dilihat dari semakin munculnya banyak komunitas-komunitas yang peduli akan pengelolaan Sub DAS Pusur. Komunitas yang muncul tidak hanya sebatas keterlibatan anak muda tetapi keterlibatan secara masif masyarakat disekitar sungai

Komunitas di sepanjang Sub DAS Pusur terus mengalami perkembangan. Kawasan hulu dari Sub DAS Pusur berkembang komunitas yang memiliki fokus kegiatan pada konservasi dimana pengelolanya tidak hanya dari petani yang memiliki lahan tetapi juga melibatkan petani wanita serta kelompok Karang Taruna dalam pengelolaan green house. Kemudian pada komunitas bank sampah terjadi perkembangan yang begitu signifikan, dimana pada awal dirintis hanya ada dua bank sampah yang didirikan di sekitar pabrik PT Tirta Investama. Kemudian saat ini di Kecamatan Polanharjo berkembang sekitar 17 bank sampah. Perkembangan yang sama juga terjadi pada komunitas yang mengelola wisata sungai atau wisata tubing. Awalnya hanya ada satu pengelola wisata tubing yang diinisiasi oleh beberapa pemuda Desa Karanglo dan dorongan dari pihak PT Tirta Investama kemudian berkembang menjadi 5 (lima) titik wisata baik itu dikelola oleh masyarakat, karang taruna, perseorangan/pribadi, maupun pemerintah.

Dilihat dari representasi keanggotaan komunitas juga tidak hanya melibatkan kelompok anak muda tetapi juga secara masif ada keterlibatan warga masyarakat yang ada di sekitar sungai. Hal ini bisa dilihat dari melibatkan ibu-ibu di sekitar lokasi wisata tubing. Keterlibatan ibu-ibu diperlukan utamanya dalam penyediaan rebusan (snack) dan makanan untuk paket wisata bagi pengunjung. Selain itu ada pula wisata yang memang bekerjasama dengan warga yang rumahnya di sekitar lokasi wisata tubing untuk penyediaan kamar mandi yang dipakai sebagai tempat mandi dan bilas bagi pengunjung. Pelibatan perempuan, khususnya ibu rumah tangga, tidak hanya mencerminkan kontribusi domestik mereka terhadap ekonomi komunitas, tetapi juga menunjukkan pengakuan atas peran strategis perempuan dalam pengelolaan sumber daya lokal. Perspektif gender dalam konteks ini penting untuk menyoroti bahwa partisipasi perempuan bukan sekadar tambahan simbolis, melainkan sebagai aktor utama yang berperan aktif dalam pemberdayaan ekonomi dan pembangunan berbasis komunitas.

Puncak dari kesadaran kolektif masyarakat dalam pengelolaan Sub DAS Pusur terwujud dalam pendirian Pusur Institute, yang berfungsi sebagai wadah koordinasi lintas komunitas dari hulu hingga hilir. Keberadaan lembaga ini menandai fase baru dalam pengelolaan yang lebih terintegrasi dan inklusif, baik

dari sisi geografis maupun sosial, dengan pengakuan dan pemberdayaan seluruh lapisan masyarakat termasuk perempuan dalam menjaga keberlanjutan wilayah Sub DAS Pusur.

### **Perubahan dari Aspek Ekologi Sungai**

Kegiatan pengelolaan Sub DAS Pusur yang dilakukan oleh berbagai komunitas telah memberikan implikasi pada perubahan pola pikir masyarakat terhadap Sungai Pusur. Jika melihat pada kawasan hulu sebagai recharge area yang memiliki kontur tanah porus yang rawan longsor, sudah ada kesadaran untuk menjaga kualitas tanah dan air. Hal ini dilakukan dengan kegiatan konservasi secara vegetatif melalui penanaman tanaman keras di lahan kritis. Masyarakat di sekitar aliran Sungai Pusur di bagian tengah dulu terkesan mengabaikan kondisi sungai, bahkan menggunakan sungai dengan tidak menerapkan prinsip-prinsip kelestarian alam. Kondisi ini lambat laun mengalami perubahan seiring dengan semakin tumbuhnya komunitas-komunitas yang bergerak dalam pengelolaan Sub DAS Pusur.



Gambar 1. Papan Larangan Membuang Sampah Sembarangan

Volume dan sebaran dari sampah baik yang ada di badan sungai maupun yang berada di sempadan sungai mulai berkurang dan dapat dikendalikan sejak adanya intervensi dari komunitas bank sampah dan komunitas wisata tubing. Masyarakat dibiasakan untuk memilah sampah yang dihasilkannya untuk kemudian di taruh di bank sampah. Kegiatan ini cukup berpengaruh pada berkurangnya intensitas masyarakat membuang sampah langsung ke sungai, karena sampah yang dihasilkan masyarakat justru bisa menghasilkan uang. Perubahan persepsi ini memperkuat *eco-awareness* yang secara perlahan terinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Kebiasaan membuang sampah sembarangan mulai ditinggalkan karena masyarakat memahami konsekuensi ekologisnya sekaligus menyadari nilai ekonomis dari pengelolaan limbah secara bijak.

Kehadiran wisata tubing di Sungai Pusur juga turut memperkuat kesadaran ekologis warga. Dengan meningkatnya kunjungan wisatawan, muncul pemahaman kolektif bahwa kebersihan sungai adalah prasyarat utama keberlanjutan sektor pariwisata lokal. Pola pikir baru pun terbentuk: sungai yang bersih akan menarik lebih banyak pengunjung, sementara sungai yang kotor akan menjadi hambatan bagi pengembangan wisata.

Selain itu, di sektor pertanian, masyarakat mulai mengadopsi pendekatan yang lebih ramah lingkungan. Melalui peran Klinik Pertanian, penggunaan pestisida kimia secara bertahap digantikan dengan pestisida nabati yang lebih

aman bagi ekosistem. Di samping itu, pelatihan dan edukasi terkait pembuatan kompos dari limbah organik juga mendorong petani untuk mengolah sampah pertanian secara mandiri dan bertanggung jawab. Proses ini bukan hanya berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan, tetapi juga meneguhkan integrasi nilai-nilai ekologis dalam praktik pertanian harian.

Secara keseluruhan, *eco-awareness* telah menjadi bagian dari habitus baru masyarakat di sepanjang Sub DAS Pusur tidak lagi sekadar himbauan normatif, tetapi sebagai kesadaran yang menyatu dalam tindakan nyata mereka. Perubahan ini menunjukkan bahwa pengelolaan lingkungan berbasis komunitas mampu menumbuhkan pola pikir ekologis yang berkelanjutan dan partisipatif.

### **Perubahan dari Asek Ekonomi**

Pengelolaan Sub DAS Pusur yang terus mengalami perkembangan tentunya juga membawa dampak ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Pada kawasan hulu tepatnya di Desa Mriyan dilakukan budidaya tanaman alternatif seperti anggrek dan krisan sebagai pengganti tanaman tembakau dan bunga mawar yang harganya tidak bisa di kendalikan oleh petani. Dari segi ekonomi tentu hal ini menjadi sumber ekonomi baru bagi petani di kawasan hulu karena harga dari angrek dan krisan terbilang stabil. Selanjutnya aspek ekonomi juga dapat dilihat dari berkembangnya wisata River Tubing di bagian tengah aliran Sub DAS Pusur. Masyarakat yang dulunya hanya bisa mengandalkan gaji pokok dari pekerjaan mereka, saat ini dengan kehadiran wisata River Tubing di Sungai Pusur bisa memperoleh pendapatan tambahan. Omset pendapatan yang diperoleh masyarakat dari wisata tubing ini semakin banyak seiring dari semakin besarnya animo masyarakat terhadap kehadiran pariwisata ini. Omset pendapatan yang diperoleh oleh komunitas wisata tubing sebagai pengelola bisa sampai jutaan rupiah perhari.



Gambar 2. Tour Guide yang mendampingi Wisatawan

Selanjutnya kehadiran program bank sampah juga membawa dampak pada aspek ekonomi bagi masyarakat. Sampah-sampah yang dikelola melalui bank sampah membuat masyarakat mendapatkan keuntungan. Sampah-sampah anorganik yang biasanya tak terkelola dengan baik dapat menjadi sampah yang layak jual sehingga masyarakat memperoleh keuntungan berupa uang. Sampah-sampah yang masuk kategori layak kreasi juga dapat dikelola menjadi berbagai macam barang kreasi seperti tas, dompet, tempat tisu dan lain sebagainya yang memiliki nilai jual yang tinggi.



Gambar 3. Produk Kerajinan dari Olahan Sampah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan Sub DAS Pusur mencerminkan dinamika praktik sosial sebagaimana dijelaskan oleh Pierre Bourdieu. Melalui habitus baru yang terbentuk dari interaksi berulang dalam ruang sosial sungai, masyarakat mulai menginternalisasi nilai-nilai kolektif, seperti kepedulian lingkungan, kolaborasi lintas kelompok, dan pelestarian sumber daya alam. Modal sosial dan kultural pun terakumulasi dalam bentuk jejaring komunitas, keterampilan mengelola sampah, serta praktik wisata ramah lingkungan. Praktik ini tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh struktur medan sosial baru yang mendorong transformasi persepsi dan tindakan masyarakat, termasuk peran strategis perempuan dalam aktivitas ekonomi berbasis lingkungan.

#### **D. KESIMPULAN**

Pengelolaan Sub Daerah Aliran Sungai (Sub DAS) Pusur di Kabupaten Klaten menunjukkan bahwa keterlibatan multipihak mulai dari komunitas lokal, pemerintah, dunia usaha, hingga lembaga swadaya masyarakat, berhasil mendorong perubahan yang signifikan dalam aspek sosial, ekologi, dan ekonomi masyarakat di sekitar aliran sungai. Dari aspek sosial kelembagaan, terlihat adanya peningkatan kesadaran kolektif warga untuk membentuk dan bergabung dalam komunitas yang berorientasi pada pelestarian lingkungan dan pengelolaan sumber daya lokal. Munculnya berbagai komunitas di sepanjang wilayah hulu, tengah, hingga hilir menjadi indikator nyata dari tumbuhnya modal sosial dan jejaring kelembagaan berbasis masyarakat. Kehadiran Pusur Institute sebagai wadah kolaboratif lintas aktor menjadi bentuk integrasi kelembagaan yang memperkuat koordinasi pengelolaan Sub DAS secara menyeluruh. ekologis, perubahan dapat diamati dari meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap kelestarian lingkungan sungai, yang tercermin dalam menurunnya volume sampah di badan sungai, peningkatan praktik pertanian ramah lingkungan, serta konservasi kawasan hulu. Sungai yang dulu kurang terawat kini menjadi ruang hidup yang lebih bersih dan produktif, serta mulai dipandang sebagai aset ekologis dan wisata oleh masyarakat setempat. Pada dimensi ekonomi, pengelolaan Sub DAS Pusur telah menciptakan peluang usaha baru bagi masyarakat. Wisata tubing, budidaya tanaman konservatif di hulu, dan pengelolaan bank sampah telah menjadi sumber penghasilan alternatif yang menopang kesejahteraan warga. Aktivitas-aktivitas ini tidak hanya menciptakan nilai ekonomi, tetapi juga membangun kesadaran bahwa pelestarian lingkungan dapat berjalan seiring dengan peningkatan taraf hidup masyarakat. Dengan demikian, studi ini menegaskan bahwa pengelolaan Sub DAS berbasis partisipasi masyarakat dan kolaborasi multipihak memiliki potensi besar dalam

menciptakan transformasi sosial-ekologis yang berkelanjutan. Pusur menjadi contoh nyata bagaimana penguatan kelembagaan lokal dapat menjadi kunci utama dalam menjawab tantangan pengelolaan sumber daya alam di tingkat tapak secara holistik dan berkeadilan. Dalam perspektif teori praktik sosial Pierre Bourdieu, transformasi ini mencerminkan pergeseran habitus masyarakat yang secara kolektif membentuk pola-pola baru dalam berpikir dan bertindak melalui medan sosial baru, di mana akumulasi modal sosial dan kultural menjadi kunci dalam menciptakan praktik yang berorientasi pada keberlanjutan dan keadilan ekologis.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. Setyo Pambudi, "Watershed Management in Indonesia: A Regulation, Institution, and Policy Review," *J. Perenc. Pembang. Indones. J. Dev. Plan.*, vol. 3, no. 2, 2019, doi: 10.36574/jpp.v3i2.74.
- [2] T. M. Basuki *et al.*, "Improvement of Integrated Watershed Management in Indonesia for Mitigation and Adaptation to Climate Change: A Review," *Sustain.*, vol. 14, no. 16, pp. 1–41, 2022, doi: 10.3390/su14169997.
- [3] T. S. Worowirasmu, M. E. Waluyo, Y. Rachmawati, and I. Y. Hidayati, "The Community – Based Flood Disaster Risk Reduction (CBDRR) in Beringin Watershed in Semarang City," *J. Wil. dan Lingkung.*, vol. 3, no. 2, p. 131, 2015, doi: 10.14710/jwl.3.2.131-150.
- [4] B. Istijono. and T. Ophiyandri., "Community-Based Approach in A Small Scale Irrigation Project in Indonesia: Ways and Advantages," *Civ. Eng. Dimens.*, vol. 17, no. 2, pp. 95–100, 2015, doi: 10.9744/ced.17.2.95-100.
- [5] N. T. Waskitho, A. A. Pratama, and T. Muttaqin, "Sectoral Integration in Watershed Management in Indonesia: Challenges and Recommendation," *IOP Conf. Ser. Earth Environ. Sci.*, vol. 752, no. 1, 2021, doi: 10.1088/1755-1315/752/1/012035.
- [6] B. H. Narendra *et al.*, "A review on sustainability of watershed management in Indonesia," *Sustain.*, vol. 13, no. 19, pp. 1–29, 2021, doi: 10.3390/su131911125.
- [7] G. Clegg, R. Haigh, D. Amaratunga, and H. P. Rahayu, "Coordination Challenges Facing Effective Flood Governance in the Ciliwung River Basin," in *Environment & Policy 61*, Springer Nature Switzerland AG, 2024, pp. 332–354. doi: 10.4324/9781003543954-15.
- [8] R. F. Lubis, R. Delinom, S. Martosuparno, and H. Bakti, "Water-Food Nexus in Citarum Watershed, Indonesia," *IOP Conf. Ser. Earth Environ. Sci.*, vol. 118, no. 1, 2018, doi: 10.1088/1755-1315/118/1/012023.
- [9] Y. Demmanggasa, "Pengaruh Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan: Studi Perbandingan di Lingkungan Pedesaan," *J. Cahaya Mandalika*, vol. 5, no. 2, pp. 739–741, 2024, [Online]. Available: <https://ojs.cahayamandalika.com/index.php/jcm/article/view/3324>
- [10] R. A. Hafidh, I. Widianingsih, and A. Buchari, "The Practice of Community-Based Water Resource Management in Rural Indonesia," *J. Gov.*, vol. 6, no. 2, pp. 216–230, 2021, doi: 10.31506/jog.v6i2.11994.
- [11] W. Taena, L. M. Kolopaking, B. Juanda, B. Barus, and R. Boer, "An institutional model of transboundary watershed management toward sustainable development," *J. Manaj. Hutan Trop.*, vol. 22, no. 1, pp. 35–46, 2016, doi: 10.7226/jtfm.22.1.35.

- [12] E. Novianti *et al.*, "Citarum Watershed Restoration through Community Involvement and Tourism Village Development," *J. Komun.*, vol. 15, no. 2, pp. 331–346, 2023, doi: 10.24912/jk.v15i2.25222.
- [13] Y. D. Hapsari, "Perubahan Habitus Masyarakat dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Berbasis Komunitas Peduli Sungai (Studi pada Sub Das Pusur Kabupaten Klaten)," 2022, *UNS (Sebelas Maret University)*.
- [14] M. A. Husada and K. Sapanli, "Analisis Kelembagaan Pengelolaan Kawasan Sub Daerah Aliran Sungai (DAS) Kabupaten Klaten," *IPB Repos.*, 2023.
- [15] M. . Miles and M. Huberman, *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1992.
- [16] G. Ritzer, *Teori Sosiologi dari Klasik sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- [17] A. Muslim and L. Eny, "Participative maintenance of upstream Pusur Sub Watershed area through the conservation field school in Mriyan village of Boyolali District, Indonesia," *Russ. J. Agric. Socio-Economic Sci.*, vol. 74, no. 2, pp. 217–223, 2018.
- [18] Y. D. Hapsari, T. Utami, and M. Wijaya, "Social Capital Of The River Tubing Tourism Community In Optimizing The Management Of The Pusur Sub-Watershed, Klaten Regency," *Int. J. Educ. Soc. Sci. Res.*, vol. 6, pp. 336–346, 2021.
- [19] M. Afandi, R. Zakaria, A. Wardoyo, A. Kusumastuti, and R. Saputro, "Pendekatan Integratif Dalam Pelestarian Sub Das Pusur Kabupaten Klaten," *Restor. Sungai; Tantangan dan Solusi Pembangunan Berkelanjutan*, no. 7, pp. 349–361, 2018.
- [20] N. Krisdinanto, "Pierre Bourdieu, Sang Juru Damai," *KANAL J. Ilmu Komun.*, vol. 2, no. 2, p. 189, 2016, doi: 10.21070/kanal.v2i2.300.